

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Secara mendasar dapat dijelaskan bahwa laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang baik mengenai prospek dan resiko perusahaan (Septiana 2019:12). Pada instansi pemerintah laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan di seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Sesuai dengan PSAP Nomor 1 Tahun 2015 secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan menunjukkan akuntabilitas ekuitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Jenis-jenis laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses identifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi (Dien 2015). Laporan realisasi anggaran

menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai perusahaan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar LRA menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan dengan anggarannya. Menurut (Basri 2013), anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Pelaksanaan anggaran memberikan implikasi bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalaw usaha itu mencapai tujuan. Menurut (Nurfadilah 2018), tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggung jawaban) pemerintah atas sumber yang dipercayakan.

Pemerintah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Menurut (Nurfadilah 2018) Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber

daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja yang dilihat dari aspek laporan realisasi anggaran, yang merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja organisasi serta prestasi (keberhasilan) suatu organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga penilaian kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran. Menurut (Kawatu 2019:49) kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa mencerminkan gambaran kinerja keuangan. Menurut (Efendi 2020), Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pihak luar untuk menciptakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berkualitas. Sesuai dengan Firman Allah Qs. Al-Ahqaaf Ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada merugikan."

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal serta tidak dizalimi. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasi maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari pekerjaannya sehingga organisasi memperoleh keuntungan.

Salah satu SKPD yang berada di Gorontalo adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Daerah 2007 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang

kesehatan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp 29.331.171.139. Dimana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 150.061.895.261 namun yang terealisasi sebesar 134.393.006.400 sehingga persentasinya sebesar 89,56 %. Pada LRA tahun 2020, akun dengan realisasi terendah antara lain akun pada pendapatan retribusi daerah dengan persentase sebesar 64,01 % dan pada akun belanja modal gedung dan bangunan sebesar 63,10%. Setelah dilakukan observasi awal, penyebab pendapatan retribusi menurun karena retribusi uji kualitas air yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah di depot-depot kurang maksimal dikarenakan banyak depot air mineral yang tutup akibat pandemi covid-19. Sama halnya dengan belanja modal gedung dan bangunan dimana persentase realisasinya hanya sebesar 63,10%. Ini juga disebabkan adanya pandemi covid-19 dimana anggaran tidak terealisasi dengan baik dikarenakan adanya refocussing yaitu memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran dalam hal ini dilakukan untuk penanganan covid-19. seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020				
NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
4	PENDAPATAN - LRA	348.964.000,00	233.836.599,00	67,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	348.964.000,00	233.836.599,00	67,01
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	348.964.000,00	225.371.200,00	64,58
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	0,00	8.465.399,00	0,00
5	BELANJA	150.410.859.261,00	134.626.842.999,00	89,51
5.1	BELANJA OPERASI	108.588.392.201,00	106.029.659.227,00	97,64
5.1.1	Belanja Pegawai	82.875.797.956,00	83.243.402.919,00	100,44
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.712.594.245,00	22.786.256.308,00	88,62
5.2	BELANJA MODAL	41.822.467.060,00	28.597.183.772,00	68,38
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.364.709.534,00	6.326.235.736,00	85,90
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.788.257.526,00	20.688.512.995,00	63,10
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.669.500.000,00	1.582.435.041,00	94,78
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(150.061.895.261,00)	(134.393.006.400,00)	89,56
7	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(150.061.895.261,00)	(134.393.006.400,00)	89,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, 2022

Seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo berjudul “ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Terdapat selisih lebih antara anggaran dan realisasi Rp. 29.331.171.139.
2. Tidak maksimalnya pendapatan retribusi pada tahun 2020.
3. Terdapat refocussing pada anggaran belanja modal gedung pada tahun 2020.

1.3 Fokus Masalah

Dalam penelitian ini terkait indentifikasi masalah di atas maka fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah menilai kinerja keuangan dengan melihat laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan melihat laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan realisasi anggaran dan kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dalam realisasi anggaran dan penilaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

3. Manfaat Peneliti

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dari sebuah realisasi anggaran dan penilaian kinerja.